



**PENGELOLAAN KAS YANG TEPAT UNTUK MENJAGA LIKUIDITAS
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
JAYA KOTA BIMA**

Hartoyo¹, Arsad²

¹Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima

²Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima

hartoyobima132@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Pengelolaan Kas, Likuiditas.</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan kas yang tepat untuk menjaga likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Informan kunci (key informan) adalah Ketua KPRI Jaya Kota Bima. Informan lain adalah pengurus dan pengawas KPRI Jaya Kota Bima. Informan keseluruhan berjumlah 6 (enam) orang. Hasil analisis data menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada KPRI Jaya Kota Bima, selama empat tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2016 tingkat perputaran kas koperasi sebesar 13,25 kali, tahun 2017 sebesar 29,87 kali, pada tahun 2018 sebesar 123,67 kali dan tahun 2019 sebesar 265,39 kali. Sedangkan tingkat rasio likuiditas yang dicapai KPRI Jaya Kota Bima juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 yaitu pada tahun 2016 sebesar 14,19%, tahun 2017 sebesar 15,29%, tahun 2018 sebesar 18,61% dan tahun 2019 sebesar 22,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada KPRI Jaya Kota Bima mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang diikuti pula dengan peningkatan rasio likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas untuk menjaga likuiditas pada KPRI Jaya Kota Bima sudah tepat.</p>

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dewasa ini sangat ditentukan oleh peran serta tiga pelaku ekonomi yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Namun, sejauh ini kegiatan perekonomian di Indonesia belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kegiatan ekonomi masih dikuasai oleh kelompok-kelompok swasta tertentu yang cenderung merugikan rakyat banyak. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan adalah melalui pendirian koperasi-koperasi. Koperasi merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dalam Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa “Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Widjaja, 1995:1). Jadi pada dasarnya, pendirian koperasi berorientasi pada kemampuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di lingkungan kerja koperasi. Koperasi dapat menjamin kelangsungan hidup usahanya melalui pertumbuhan dan perkembangan koperasi dengan melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, koperasi akan mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Untuk dapat menjalankan peranan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka koperasi harus mengelola usaha yang dijalankannya dengan baik. Salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan koperasi adalah bagaimana koperasi tersebut dapat mengelola kas dengan tepat. Setiap badan usaha dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai kegiatan operasional koperasi sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Menurut Ikatan Akutansi Indonesia (1996:31.10) bahwa “Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah”.

Oleh karena itu koperasi harus memperhatikan laporan keuangan koperasi khususnya laporan neraca dan laporan rugi/laba setiap tahunnya. Laporan neraca dan laporan rugi/laba dapat memberikan gambaran tentang hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam periode yang bersangkutan melalui hasil analisis laporan keuangan khususnya analisis ratio likuiditas, sehingga dapat diinterpretasikan dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Analisis ratio likuiditas merupakan salah satu kriteria dalam penilaian perkembangan koperasi. Menurut Riyanto (1997:25) “Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang segera harus dipenuhi”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa likuiditas sangat penting diketahui sebab hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya yang segera harus dibayar. Sebab suatu koperasi yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajibannya yang segera harus dipenuhi.

Demikian pula halnya dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima yang walaupun sudah termasuk kategori koperasi yang mandiri namun harus tetap memperhatikan tingkat likuiditasnya yaitu tingkat kemampuan finansial koperasi yang segera harus dipenuhi, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan koperasi dengan menggunakan alat analisis ratio likuiditas, sehingga predikat sebagai koperasi yang mandiri dapat dipertahankan.

Data keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima selama tahun 2016-2019 ditinjau dari jumlah kas memiliki perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Adanya peningkatan maupun penurunan jumlah kas koperasi belum dapat dijadikan patokan bahwa Koperasi Pegawai Negeri JAYA Kota Bima memiliki kekuatan membayar kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi.

Sehingga timbul permasalahan yang harus dipecahkan yaitu apakah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima dapat dikatakan telah memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, hal tersebut perlu dianalisis dengan lebih cermat untuk mengetahui perkembangan Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima dari tahun ke tahun. Sebab perkembangan koperasi dapat diketahui dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangannya dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis ratio financial berupa rasio likuiditas, dari jumlah rasio likuiditas pada tiap periodenya dapat diketahui perkembangan koperasi, apakah semakin meningkat atau semakin menurun dan apabila di suatu periode perkembangan koperasi dinyatakan menurun maka untuk periode mendatang dapat dibuat suatu perencanaan untuk memperbaiki kondisi koperasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif, mengambil data secara empiris dan bertipe deskriptif, metode deskriptif yang dimaksud adalah metode yang menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul melalui hasil penelitian (Arikunto, 2002:86). Dalam hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan pengamatan secara langsung dan tidak langsung pada obyek yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kas yang tepat untuk menjaga likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Kota Bima. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini adalah: ketua KPRI Jaya Kota Bima sebagai informan kunci. Informan lain adalah pengurus dan pengawas KPRI Jaya Kota Bima. Informan keseluruhan berjumlah 6 (enam) orang. Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis melalui dua tahap yaitu dengan menghitung nilai tingkat perputaran piutang dan nilai rasio likuiditas sebagai berikut:

1. Nilai tingkat perputaran kas

$$\text{tingkat perputaran kas (cash turnover)} = \frac{\text{Salles (penjualan)}}{\text{Jumlah Kas}}$$

(Riyanto, 1997:95)

2. Nilai rasio likuiditas

$$\text{rasio likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

(Depkop, 1996:27)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mempermudah perhitungan perputaran kas dan rasio likuiditas berikut disajikan data dari Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima.

Tabel 4.1
Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Kota Bima
Per 31 Desember 2016-2017

AKTIVA		TAHUN 2016	TAHUN 2017
1.	Aktiva Lancar		
	- Kas	Rp. 43.455.429,00	Rp. 21.312.466,62
	- Bank	Rp. 103.590.000,00	Rp. 45.000.000,00
	- Piutang S/P	Rp. 700.659.840,00	Rp. 649.787.435,00
	- Piutang dagang	Rp. 282.604.079,00	Rp. 251.973.174,00
	- Cad. Peny. PTT	Rp. (14.527.098,00)	Rp. (12.337.587,02)
	- Persed. barang	Rp. 83.630.275,00	Rp. 69.166.120,00
	Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 1.199.412.525,00	Rp. 1.024.901.608,60
2.	Investasi Jk. Panjang		
	- Simpok pd PKPRI	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
	- Simwa pd PKPRI	Rp. 14.218.233,00	Rp. 11.942.232,74
	- Smp.oby pd PKPRI	Rp. 180.000,00	Rp. 180.000,00
	- Simp. pd IKPRI	Rp. 91.320,00	Rp. 91.320,00
	Jml Investasi Jk. Panjang	Rp. 14.589.833,00	Rp. 12.313.552,74
3.	Aktiva Tetap		
	- Tanah	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00
	- Bangunan	Rp. 28.971.849,00	Rp. 28.971.849,00
	- Peral. Usaha	Rp. 6.897.605,00	Rp. 6.897.605,00
	- Perleng. Kantor	Rp. 7.775.692,00	Rp. 7.115.692,00
	- Akum. Penyust.	Rp. (21.310.895,00)	Rp. (19.462.042,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	Rp. 24.834.251,00	Rp. 26.023.104,00
	Total Aktiva	Rp. 1.238.836.328,00	Rp. 1.063.238.265,34

Sumber: Neraca KPRI Jaya Kota Bima, 2017.

Lanjutan Tabel ...

PASIVA		TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Kewajiban Lancar		
	- Smp. Wj. Khusus	Rp. 18.339.450,00	Rp. 16.242.805,00
	- S.W Pinjaman	Rp. 45.336.274,00	Rp. 35.733.912,00
	- Dana pensiun	Rp. 11.510.500,00	Rp. 10.085.500,00
	- Dana pemb. SHU	Rp. 9.338.810,00	Rp. 4.951.339,21
	Jumlah Kwajiban Lancar	Rp. 84.525.034,00	Rp. 67.013.556,21
2.	Kewajiban Jk. Pjang		
	- Hutang bank		Rp. 111.065.556,21
3.	Kekayaan Bersih		
	- Simp. Pokok	Rp. 5.080.000,00	Rp. 5.080.000,00
	- Simp. Wajib	Rp. 661.592.627,00	Rp. 565.617.607,00
	- Modal donasi	Rp. 390.000,00	Rp. 390.000,00
	- Cad. koperasi	Rp. 272.975.788,00	Rp. 222.442.376,38
	- Cad. khusus	Rp. 1.600.000,00	Rp. 1.600.000,00
	- Cad. rsko kematian	Rp. 37.916.565,00	Rp. 32.650.018,00
	- SHU	Rp. 174.756.314,00	Rp. 168.444.706,96
	Jumlah	Rp. 1.154.311.294,00	Rp. 996.224.708,34
	Total Pasiva	Rp. 1.238.836.328,00	Rp. 1.063.238.265,34

Sumber: Neraca KPRI Jaya Kota Bima, 2017.

Tabel 4.2
Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima Per 31
Desember 2018-2019

AKTIVA		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Aktiva Lancar		
	- Kas	Rp. 12.316.264,00	Rp. 6.800.658,00
	- Bank	Rp. 135.395.012,00	Rp. 163.825.012,00
	- Piutang S/P	Rp. 2.630.009.844,00	Rp. 2.869.210.709,00
	- Piutang BKE	Rp. 957.405.935,00	Rp. 2.686.985.200,00
	- Piutang dagang	Rp. 516.503.900,00	Rp. 605.491.450,00
	- Cad. Peny. PTT	Rp. (25.198.720,00)	Rp. (27.441.406,00)
	- Persed. barang	Rp. 37.357.180,00	Rp. 38.983.318,00
	- Modal kerja toko	Rp. 142.799.905,00	Rp. 161.337.106,00
	- Saham pd BKE	Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
	Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 4.556.539.320,00	Rp. 6.805.192.047,00
2.	Investasi Jk. Panjang		
	- Simpok pd KPRI	Rp. 22.513.695,00	Rp. 26.221.695,00
	- Saham BKM	Rp. 1.600.000,00	Rp. 1.600.000,00
	Jml Investasi Jk. Panjang	Rp. 24.113.695,00	Rp. 27.821.695,00
3.	Aktiva Tetap		
	- Bangunan/toko	Rp. 86.503.480,00	Rp. 86.503.480,00
	- Peral. Usaha	Rp. -	Rp. -
	- Perleng. Kantor	Rp. 46.879.278,00	Rp. 49.006.778,00
	- Akum. Penyust.	Rp. (24.236.120,00)	Rp. (27.360.155,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	Rp. 109.146.638,00	Rp. 108.150.103,00
	Total Aktiva	Rp. 4.689.999.654,00	Rp. 6.941.163.845,00

Sumber data: Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima
Lanjutan Tabel ...

PASIVA		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Kewajiban Lancar		
	- Dana Bantuan Klrng	Rp. 26.471.765,00	Rp. 33.953.765,00
	- Simpanan sukarela	Rp. 19.040.886,00	Rp. 21.270.186,00
	- Dana pghapusan piutang	Rp. 23.064.166,00	Rp. 24.122.511,00
	- Dana pemb. SHU	Rp. 33.411.391,00	Rp. 60.546.057,00
	- Modal kerja	Rp. 142.799.906,00	Rp. 161.337.106,00
	Jumlah Kwajiban Lancar	Rp. 244.788.114,00	Rp. 301.229.625,00
2.	Kewajiban Jk. Pjang		
	- Hutang BKE	Rp. 1.146.493.870,00	Rp. 2.849.814.750,00
	- Simpanan khusus	Rp. 92.966.300,00	Rp. 99.509.100,00
	Jumlah Kwajiban Jk. Pjng	Rp. 1.239.480.170,00	Rp. 2.949.323.850,00
3.	Kekayaan Bersih		
	- Simp. Pokok	Rp. 13.700.000,00	Rp. 13.825.000,00
	- Simp. Wajib	Rp. 1.688.262.700,00	Rp. 1.889.225.800,00
	- Modal donasi	Rp. 360.676,00	Rp. 369.676,00
	- Cadangan	Rp. 755.667.334,00	Rp. 979.986.832,00
	- Hasil usaha yang dibagi	Rp. 448.638.996,00	Rp. 484.321.837,00
	- SHU Tahun berjalan	Rp. 299.092.664,00	Rp. 322.801.225,00
	Jumlah Kekayaan Bersih	Rp. 3.205.731.370,00	Rp. 3.690.610.370,00
	Total Pasiva	Rp. 4.689.999.654,00	Rp. 6.941.163.845,00

Berikut ditampilkan data Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

Tabel 4.3
Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima Per 31 Desember 2016-2017

	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
1. Penjualan/Pendapatan				
- Penjualan barang	Rp.	384.192.080,00	Rp.	455.834.200,00
- Pendapatan jasa S/P	Rp.	191.557.967,00	Rp.	180.834.845,00
- Pendapatan lain-lain	Rp.	-	Rp.	-
Jumlah	Rp.	575.750.047,00	Rp.	636.669.045,00
2. Harga Pokok Pjualan				
- HP Pjualan Brg	Rp.	329.160.845,00	Rp.	384.137.135,00
- HP Pjualan jasa	Rp.	-	Rp.	-
HPP	Rp.	329.160.845,00	Rp.	384.137.135,00
SHU Bruto	Rp.	246.589.200,00	Rp.	252.531.910,00
3. Beban-beban				
- By. usaha S/P	Rp.	63.565.401,00	Rp.	73.772.988,03
- By. usaha toko	Rp.	8.267.487,00	Rp.	10.314.215,01
Jumlah	Rp.	71.832.888,00	Rp.	84.087.203,04
SHU Bersih	Rp.	174.756.314,00	Rp.	168.444.706,96

Sumber data: Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KPRI JAYA Kota Bima

Tabel 4.4 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima Per 31 Desember 2018-2019

	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
1. Penjualan/Pendapatan				
- Penjualan barang	Rp.	410.546.700,00	Rp.	400.358.698,00
- Pendapatan jasa S/P	Rp.	1.112.544.035,00	Rp.	1.404.480.669,00
Jumlah	Rp.	1.523.100.735,00	Rp.	1.804.839.367,00
2. Harga Pokok Penjualan				
- HP Penjualan barang	Rp.	346.811.261,00	Rp.	361.375.380,00
- HP Penjualan jasa	Rp.	-	Rp.	-
HPP	Rp.	324.176.461,00	Rp.	322.392.062,00
3. Keuntungan Kotor	Rp.	1.198.924.274,00	Rp.	1.482.447.305,00
Beban Usaha				
- Beban operasional	Rp.	18.856.400,00	Rp.	61.800.000,00
- Beban organisasi	Rp.	125.034.014,00	Rp.	118.903.469,00
- Beban adm dan umum	Rp.	20.915.752,00	Rp.	44.053.531,00
Jumlah beban usaha	Rp.	444.806.166,00	Rp.	224.757.000,00
Beban Jasa Anggota	Rp.	448.638.996,00	Rp.	484.321.837,00
4. SHU sebelum pos-pos luar usaha	Rp.	286.386.448,00	Rp.	803.368.468,00

- Pendapatan lain-lain			
- Beban lain-lain/BKE	Rp.	286.386.448,00	450.487.243,00
Jumlah pos luar usaha			
SHU Bersih	Rp.	299.092.664,00	Rp. 322.881.225,00

Sumber data: Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KPRI JAYA Kota Bima

Namun untuk mempermudah perhitungan perlu kiranya dibuatkan tabel tersendiri yang memuat data-data atau nilai-nilai yang akan dilibatkan dalam perhitungan yang meliputi data penjualan, data jumlah kas, data aktiva lancar dan data hutang lancar sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data penjualan dan jumlah kas yang dimiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2016-2019

Tahun	Penjualan	Jumlah kas
2016	Rp 575.750.047,00	Rp 43.455.429,00
2017	Rp 636.669.045,00	Rp 21.312.466,00
2018	Rp 1.523.100.735,00	Rp 12.316.264,00
2019	Rp 1.804.839.367,00	Rp 6.800.658,00

Sumber data: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima

Data penjualan diperoleh dari perhitungan hasil usaha (PHU) yaitu jumlah penjualan barang dan pendapatan jasa sedangkan data jumlah kas diperoleh dari neraca pada bagian aktiva lancar.

Tabel 4.6

Data aktiva lancar dan hutang lancar yang dimiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2016-2019

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar
2016	Rp 1.199.412.525,00	Rp 84.525.034,00
2017	Rp 1.024.901.608,60	Rp 67.013.556,21
2018	Rp 4.556.539.320,00	Rp 244.788.114,00
2019	Rp 6.805.192.047,00	Rp 301.229.625,00

Sumber data: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima

Data tentang aktiva lancar diperoleh dari neraca pada bagian aktiva lancar, sedangkan data mengenai hutang lancar diperoleh dari neraca pada bagian kewajiban lancar.

Dengan melihat tabel tersebut, maka dapatlah penulis menghitung melalui analisis statistik berapa besarnya perputaran kas dan rasio likuiditas. Untuk membantu dalam memecahkan masalah ini, penulis akan melakukan analisis-analisis melalui analisis statistik dengan menggunakan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Perhitungan tingkat perputaran kas (*cash turnover*)

Dalam melakukan perhitungan tingkat perputaran kas (*cash turnover*) yang perlu diperhatikan adalah perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas yang dinyatakan dalam kali. Tingkat perputaran kas (*cash turnover*) ini dipergunakan

untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola kas yang tepat. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perputaran kas (cash turover)} = \frac{\text{Salles (Penjualan)}}{\text{Jumlah kas}}$$

a. Perhitungan perputaran kas (*cash turover*) untuk tahun 2016

$$\text{Perputaran kas (cash turover)} = \frac{\text{Rp.575.750.047,00}}{\text{Rp.43.455.429,00}} = 13,25 \text{ kali}$$

Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk memutar atau mengelola kas pada tahun 2016 adalah sebesar 13,25 kali ini berarti bahwa setiap rupiah kas yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 13,25 kali perputaran.

b. Perhitungan perputaran kas (*cash turover*) untuk tahun 2017

$$\text{Perputaran kas (cash turover)} = \frac{\text{Rp.636.669.045,00}}{\text{Rp. 21.312.466,62}} = 29,87 \text{ kali}$$

Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk memutar atau mengelola kas pada tahun 2017 adalah sebesar 29,87 kali ini berarti bahwa setiap rupiah kas yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 29,87 kali perputaran.

c. Perhitungan perputaran kas (*cash turover*) untuk tahun 2018

$$\text{Perputaran kas (cash turover)} = \frac{\text{Rp.1.523.100.735,00}}{\text{Rp. 12.316.264,00}} = 123,67 \text{ kali}$$

Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk memutar atau mengelola kas pada tahun 2018 adalah sebesar 123,67 kali ini berarti bahwa setiap rupiah kas yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 123,67 kali perputaran.

d. Perhitungan perputaran kas (*cash turover*) untuk tahun 2019

$$\text{Perputaran kas (cash turover)} = \frac{\text{Rp.1.814.839.367,00}}{\text{Rp. 6.800.658,00}} = 265,39 \text{ kali}$$

Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk memutar atau mengelola kas pada tahun 2019 adalah sebesar 265,39 kali ini berarti bahwa setiap rupiah kas yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 265,39 kali perputaran.

2. Perhitungan rasio likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan koperasi untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Perhitungannya melalui perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar sebagai berikut:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

a. Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2016

$$\text{Rasio likuiditas} = \frac{\text{Rp.1.199.412.525,00}}{\text{Rp. 84.525.034,00}} \times 100\% = 14,19\%$$

Jadi rasio likuiditas yang diperoleh oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2016 adalah sebesar 14,19% ini berarti kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan segera dari setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 14,19%.

b. Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2017

$$\text{Rasio likuiditas} = \frac{\text{Rp.1.024.901.608,00}}{\text{Rp. 67.013.556,00}} \times 100\% = 15,29\%$$

Jadi rasio likuiditas yang diperoleh tahun 2017 adalah sebesar 15,29% ini berarti kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan segera dari setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 15,29%.

c. Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2018

$$\text{Rasio likuiditas} = \frac{\text{Rp.4.556.539.320,00}}{\text{Rp. 244.788.114,00}} \times 100\% = 18,61\%$$

Jadi rasio likuiditas yang diperoleh oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2018 adalah sebesar 18,61% ini berarti kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan segera dari setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 18,61%.

d. Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2019

$$\text{Rasio likuiditas} = \frac{\text{Rp.6.805.192.047,00}}{\text{Rp. 301.2259.625,00}} \times 100\% = 22,59\%$$

Jadi rasio likuiditas yang diperoleh oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2019 adalah sebesar 22,59% ini berarti kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan segera dari setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 22,59%.

Dan hasil analisis data di atas tentang tingkat perputaran kas yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola kas yang tepat dan rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima, selama empat tahun dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2019 terus terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2016 tingkat perputaran kas koperasi sebesar 13,25 kali, tahun 2017 sebesar 29,87 kali, pada tahun 2018 sebesar 123,67 kali dan tahun 2019 sebesar 265,39 kali.

Sedangkan tingkat rasio likuiditas yang dicapai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 yaitu pada tahun 2016 sebesar 14,19%, tahun 2017 sebesar 15,29%, tahun 2018 sebesar 18,61% dan tahun 2019 sebesar 22,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang diikuti pula dengan peningkatan rasio likuiditas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas untuk menjaga likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima sudah tepat, terlihat betapa pentingnya kelancaran koperasi dalam memenuhi setiap kewajibannya yang memberikan reputasi yang baik bagi koperasi tersebut sehingga koperasi mendapat kepercayaan dari berbagai pihak baik anggota maupun pihak ketiga yang memberikan bantuan modal untuk selanjutnya digunakan untuk menambah modal dalam kegiatan usaha kredit (simpan pinjam).

KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan analisis data terhadap data-data yang diperoleh yang menunjukkan tingkat perputaran kas dan rasio likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima pada Bab IV di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas untuk menjaga likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima sudah tepat, hal tersebut dapat dilihat dari: Tingkat perputaran kas yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola kas secara tepat dengan membandingkan jumlah penjualan dengan jumlah kas untuk tahun 2016 tingkat perputaran kas koperasi sebesar 13,25 kali, tahun 2017 sebesar 29,87 kali, pada tahun 2018 tingkat perputaran kas koperasi sebesar 123,67 kali sedangkan tahun 2019 sebesar 265,39 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio likuiditas yang menunjukkan tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan harta lancar dan utang lancar untuk tahun 2016 rasio likuiditas koperasi sebesar 14,19%, pada tahun 2017 rasio likuiditas koperasi sebesar 15,29%, tahun 2018 rasio likuiditas koperasi sebesar 18,61% dan tahun 2019 rasio likuiditas koperasi sebesar 22,59%, artinya didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S .2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.
- Depkop. 1996. *Pedoman dan Petunjuk Teknis (Sistem Penilaian Koperasi Karyawan Mandiri)*. Jakarta: Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan.
- Edilius, dkk. 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasan. 1996. *Kumpulan Bahan Pelatihan Kelembagaan Gerakan Koperasi*. Kabupaten Bima: Proyek Kelembagaan Koperasi.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 1996. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Kertasapoetra, dkk. 1991. *Koperasi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Munawir. 1997. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta:Liberty
- Reksohadiprojo.1997. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Haji Masagung : Jakarta
- Riyanto. 1997. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta:Penerbit Gajah Mada.
- Sudarsono. 2000. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sutrisno, 2001. *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonosia
- Widjaya.1995. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta:PT. Rineka Cipt